



# Keterlibatan Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi

## Usulan Standar Lingkungan Hidup dan Sosial 10\*



## TENTANG APA USULAN ESS10?

Keterlibatan pemangku kepentingan yang efektif dan pengungkapan informasi yang proporsional dengan sifat dan skala proyek dapat meningkatkan keberlanjutan perlindungan lingkungan dan sosial proyek, meningkatkan penerimaan proyek, dan mengarah pada peningkatan hasil sosial, lingkungan, dan keuangan. Standar yang diusulkan mengakui pentingnya keterlibatan secara terbuka, transparan, dan aman antara peminjam/klien dengan orang-orang yang terkena dampak proyek termasuk masyarakat lokal, masyarakat tempatan, pekerja proyek dan perwakilan pekerja, dan pemangku kepentingan proyek lainnya di sepanjang siklus proyek. Standar ini mengkonsolidasikan semua persyaratan yang terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk konsultasi yang bermakna, pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan. Usulan ESS10 menggabungkan persyaratan untuk konsultasi yang bermakna, pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan dalam Pernyataan Kebijakan Upaya Perlindungan (SPS, 2009).

\* Teks lengkap ESS10 dapat dibaca di [Safeguard Policy Review: Draft Policy | Asian Development Bank \(adb.org\)](https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy). <https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review/draft-policy>. Brosur informasi ini disiapkan berdasarkan rancangan konsultasi usulan Kerangka Kerja Lingkungan dan Sosial (ESF) yang hanya untuk tujuan informasi. Panduan dari Dewan Direksi ADB akan diminta untuk teks lengkap dari usulan ESF sebagai bagian dari Kertas Kerja, yang dijadwalkan pada kuartal keempat tahun 2023. ESF final akan dipertimbangkan untuk disetujui oleh Dewan Direksi ADB pada tahun 2024.



**SAFEGUARD  
POLICY REVIEW  
AND UPDATE**





## Tujuan dari standar ini adalah untuk:

- menetapkan pendekatan yang sistematis dalam melibatkan pemangku kepentingan yang akan membantu peminjam/klien membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dan responsif dengan pemangku kepentingan mereka;
- menilai tingkat minat dan dukungan pemangku kepentingan terhadap suatu proyek melalui konsultasi yang bermakna, dan memungkinkan pandangan pemangku kepentingan diperhitungkan dalam proses pembangunan proyek, dan dalam pelaksanaan dan pemantauan kinerja lingkungan dan sosial (E&S);
- mendorong dan menyediakan sarana untuk keterlibatan yang efektif dan inklusif dengan pemangku kepentingan mengenai isu-isu yang berpotensi mempengaruhi mereka selama fase persiapan, dan fase implementasi dari siklus proyek;
- memastikan informasi proyek yang tepat tentang risiko dan dampak E&S diungkapkan kepada pemangku kepentingan dengan cara dan format yang tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diakses;
- memastikan kebutuhan dan masalah orang-orang yang dirugikan atau rentan terkena dampak proyek, diakui dan diperhitungkan dalam proses keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan informasi; dan
- menyediakan sarana yang aman, mudah diakses, dan inklusif bagi pemangku kepentingan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, masalah, dan keluhan, tanpa ancaman pembalasan, dan memastikan bahwa peminjam/klien menanggapi dan mengelolanya secara efektif.



# APA SAJA KETENTUAN KEBIJAKAN YANG BARU DAN YANG LEBIH BAIK?

1



## Menyusun Rencana Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Standar yang diusulkan menguraikan persyaratan dan proses untuk konsultasi yang bermakna, mempromosikan partisipasi dengan cara yang aman dan dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Ini mengharuskan peminjam/klien untuk menyiapkan rencana keterlibatan pemangku kepentingan (SEP) yang proporsional dengan sifat dan skala proyek. SEP dapat berupa dokumen yang berdiri sendiri atau bagian dari dokumen lingkungan dan sosial lain yang disiapkan untuk suatu proyek.

2



## Kelompok yang dirugikan atau rentan

Peminjam/klien akan memastikan bahwa kelompok yang dirugikan atau rentan akan diidentifikasi melalui keterlibatan pemangku kepentingan dan memastikan kebutuhan dan masalah mereka diakui dan diperhitungkan dalam keterlibatan pemangku kepentingan dan proses pengungkapan informasi dan dalam perencanaan mekanisme pengaduan keluhan.

3



## Membangun mekanisme pengaduan yang dapat diakses

Peminjam/klien akan membangun mekanisme pengaduan pada tahap paling awal untuk memastikan tanggapan dan pengelolaan keluhan yang tepat waktu. Mekanisme pengaduan akan menetapkan persyaratan yang jelas untuk menangani kasus dugaan tindakan pembalasan, pelecehan, intimidasi, atau diskriminasi, dan mengambil langkah perbaikan yang tepat, dan memiliki ketentuan untuk menangani pengaduan secara anonim.

4



### Pengungkapan informasi proyek

Standar yang diusulkan mensyaratkan adanya saluran komunikasi dua arah untuk mengungkapkan informasi proyek untuk semua proyek Risiko Tinggi, Risiko Substansial, dan Risiko Sedang, sedini mungkin dalam persiapan proyek dan dalam jangka waktu yang memungkinkan konsultasi yang bermakna dengan pemangku kepentingan tentang desain proyek, tetapi tidak melampaui jangka waktu penilaian proyek ADB untuk proyek di sektor pemerintah dan persetujuan kredit akhir untuk proyek di sektor swasta. Pendekatan ini selaras dengan standar bank pembangunan multilateral (MDB) lainnya. Pengungkapan informasi kepada orang-orang yang terkena dampak proyek harus dengan cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan sesuai budaya, dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik kelompok yang mungkin terdampak secara berbeda atau secara tidak proporsional oleh suatu proyek.

5



### Alokasi sumber daya keuangan dan manusia yang memadai

Peminjam/klien akan mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia yang memadai untuk memastikan pelaksanaan rencana sosial dan lingkungan (Social and Environmental Plan/SEP), termasuk pengungkapan informasi dan mekanisme pengaduan. Para ahli pihak ketiga yang memenuhi syarat dilibatkan berdasarkan kompleksitas proyek untuk memantau dan melaporkan implementasi dan rekomendasi untuk mengatasi kesenjangan dan masalah yang teridentifikasi.

